

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Ulfa Ulfa¹, Maimun², Eti Karini³.

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, uliaulfaa32@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, maimun60@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, etika@radenintan.ac.id

Corresponding Author: uliaulfaa32@gmail.com

Abstract: *The energy conversion programme through the distribution of subsidised 3kg LPG gas cylinders is a strategic step by the government to support the welfare of low-income communities and micro-businesses. The objective of this study is to analyse the implementation of Article 3(1) of Presidential Regulation No. 104 of 2007 from the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyah* in Pulung Kencana Village, Tulang Bawang Tengah Sub-district, Tulang Bawang Barat District. The research method employed a descriptive qualitative approach using interview and participatory observation techniques with various stakeholders. The research findings reveal that the implementation of the policy has not been carried out in accordance with the regulatory mandate. The distribution of 3kg LPG gas cylinders is still dominated by the middle-to-upper class and civil servants, making it difficult for vulnerable groups to access them. The contributing factors include weaknesses in the verification system for recipients' identities, insufficient multi-level oversight mechanisms, and non-compliance with existing regulations. An analysis of *fiqh siyasah tanfidziyah* shows that the policy implementation contradicts the principles of distributive justice (*al-'adalah*), the fulfilment of trust in public policy management, and the orientation towards the welfare of the community. The inaccuracy of the target group creates detrimental effects on the intended beneficiaries and reduces the effectiveness of the energy conversion programme. This results in misdirected subsidy distribution and exacerbates inequality.*

Keyword: Implementation, Distribution of energy subsidies, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Abstrak: Program konversi energi melalui distribusi gas elpiji 3kg bersubsidi sebagai langkah strategis pemerintah mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dari perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* di Desa Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi partisipatif terhadap berbagai pihak. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan sesuai amanat regulasi. Penyaluran gas elpiji 3kg masih didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke atas dan ASN, sehingga kelompok rentan sulit mendapatkan akses. Faktor-faktor penyebab meliputi lemahnya sistem verifikasi identitas penerima, minimnya mekanisme pengawasan multi-level, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis *fiqh siyasah tanfidziyah* menunjukkan implementasi kebijakan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (*al-'adalah*), pelaksanaan amanah dalam pengelolaan kebijakan publik, dan orientasi kemaslahatan umat. Dampak ketidaktepatan sasaran menciptakan efek yang merugikan kelompok target dan mengurangi efektivitas program konversi energi. Hal ini mengakibatkan distribusi subsidi menjadi salah sasaran dan menimbulkan ketimpangan.

Kata Kunci: Implementasi, Distribusi subsidi energi, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

PENDAHULUAN

Gas Elpiji 3kg merupakan produk bersubsidi dari pemerintah yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari program konversi energi nasional, khususnya untuk menggantikan penggunaan minyak tanah. Produk ini ditujukan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro, dengan tujuan menyediakan sumber energi yang lebih hemat dan mudah dijangkau secara ekonomi. Pemanfaatan Elpiji sebagai alternatif pengganti minyak tanah tidak hanya membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga kurang mampu, tetapi juga berkontribusi dalam menekan beban subsidi BBM yang selama ini membebani APBN. (Lail dkk., 2023) Selain itu, penggunaan Elpiji cenderung lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi secara berlebihan. Program konversi energi ini diluncurkan sebagai respon terhadap semakin menipisnya ketersediaan minyak tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji. Kebijakan pemerintah tersebut dimana pemerintah dengan gencar-gencarnya melakukan sosialisasi penggunaan gas elpiji bagi konsumsi rumah tangga dan usaha mikro yang dibarengi dengan membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji 3 kg secara gratis kepada masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro” (*PERPRES No. 104 Tahun 2007*) menjadi dasar hukum kebijakan tersebut. Kemudian penerima gas LPG 3 kg tersebut ialah:

- A) Rumah Tangga yang berhak menerima paket LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Ibu rumah tangga
 - 2) Pengguna minyak tanah bumi
 - 3) Kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran <1,5 juta/bulan).
 - 4) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK ataupun surat keterangan dari kelurahan setempat.
- B) Usaha mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dengan kriteria:
 - 1) Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
 - 2) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau

surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

Subsidi energi khususnya gas Elpiji 3 kg, memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro. (Muharam dkk., 2025) Tujuan utama dari kebijakan subsidi ini adalah untuk menjamin akses terhadap energi dengan harga yang terjangkau bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi. Dengan tersedianya energi murah, kelompok ini dapat mengalokasikan pendapatan mereka ke sektor-sektor prioritas lainnya, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Bagi sektor usaha mikro, subsidi energi merupakan elemen penting dalam menjaga kelangsungan dan efisiensi operasional. Biaya energi yang lebih rendah memungkinkan pengusaha kecil untuk mengurangi pengeluaran produksi, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang usaha. Mengingat keterbatasan modal dan kerentanan usaha mikro terhadap ketidakstabilan harga energi, subsidi semacam ini berperan dalam mendukung ketahanan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja di tingkat komunitas.

Kendatipun demikian, tantangan signifikan dalam pelaksanaan subsidi energi terletak pada efektivitas penyalurannya. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tanpa sistem distribusi yang akurat dan terarah, manfaat subsidi cenderung lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. (Azim dkk., 2025) Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme distribusi yang selektif dan berbasis kebutuhan agar subsidi benar-benar sampai kepada kelompok sasaran, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kemudian jika kita lihat dalam *fiqh siyasah* yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah, dan berhubungan dengan pemerintahan, politik, serta kebijakan. Bahwa dengan adanya distribusi yang tidak merata pada gas Elpiji 3kg sehingga penting untuk dilakukan ulang distribusi subsidi energi berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan sosial (Muhammad Iqbal, 2016). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti program energi berbasis komunitas, cenderung lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan ini, penyaluran subsidi dapat lebih tepat sasaran karena menjangkau daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, perumusan kebijakan distribusi subsidi energi harus mempertimbangkan dinamika ekonomi lokal dan karakteristik usaha mikro. Pendekatan yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan utamanya. Pada konteks subsidi energi, khususnya gas Elpiji 3 kg, dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok rentan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Soekanto, 1981). Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari informan yang telah ditentukan agar mendapatkan informasi yang akurat serta dapat digunakan dalam penulisan ini. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Marzuki, 2017). Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya menggambarkan tentang keadaan obyek yang diteliti atau masalah semata, akan tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi dan menafsirkan data data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual Penyaluran Gas Elpiji 3Kg di Desa Pulung Kencana

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditemukan bahwa implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 belum berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian (Hendra & Mayarni, 2024) yang menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait menimbulkan beberapa permasalahan pendistribusian, seperti terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg, harga jual gas LPG 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan adanya pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg keluar wilayah yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber di lapangan, terungkap bahwa penyaluran gas elpiji 3kg masih banyak yang belum tepat sasaran. Ketidaktepatan dalam penyaluran subsidi ini terlihat dalam berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi secara sistematis dan terstruktur.

Dinamika distribusi gas elpiji bersubsidi di Desa Pulung Kencana menunjukkan rumitnya persoalan struktural yang telah tertanam dalam sistem distribusi energi nasional. Ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi, padahal keduanya seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program subsidi. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga mencerminkan belum matangnya sistem tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan amanat konstitusi ke dalam pelayanan publik yang adil dan merata.

Dari sudut pandang sosiologis, distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran menimbulkan bentuk stratifikasi sosial baru di tengah masyarakat, di mana akses terhadap subsidi dijadikan sebagai penanda tingkat ekonomi. Ironisnya, kelompok yang semestinya menerima manfaat utama justru tersisih dari sistem yang seharusnya memberikan perlindungan bagi mereka. Situasi ini menegaskan perlunya perubahan pendekatan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis distribusi, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan sosial serta upaya pemberdayaan masyarakat. Tantangan terbesarnya adalah merancang sistem yang mampu mengenali dan memverifikasi penerima subsidi secara akurat tanpa menambah beban birokrasi yang rumit dan justru menyulitkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (Djohanis, 2024).

Penyimpangan Dalam Kondisi Rumah Tangga

Hasil wawancara dengan Ibu Maya, selaku pemilik warung sembako di Desa Pulung Kencana, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa *"Sering kali yang datang membeli gas 3kg ini kebanyakan masyarakat menengah ke atas, bahkan PNS juga ikut pakai gas subsidi. Mereka beli biasanya sampai 3 biji gas elpiji tabung 3kg yang bersubsidi. Padahal sudah saya tawarkan gas elpiji 5kg dan 12kg akan tetapi mereka menolaknya."* Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Yanti, salah satu warga Desa Pulung Kencana yang tergolong keluarga kurang mampu, yang menyatakan: *"Saya sering kesulitan mendapatkan gas 3kg karena sudah habis duluan diambil sama yang mampu. Mereka beli banyak sekaligus, sedangkan kami yang benar-benar butuh malah kehabisan."* Kondisi ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/3538/V.25/2023 tentang Pengawasan Penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3kg yang secara tegas menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kabupaten/kota se-provinsi Lampung tidak diperkenankan menggunakan gas LPG 3kg bersubsidi. Namun dalam implementasinya, surat edaran ini tidak dilaksanakan dengan benar dan tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif.

Fenomena penyimpangan dalam kategori rumah tangga menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara konsep normatif mengenai kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi nyata masyarakat di tingkat lokal. Ketidakmampuan sistem dalam mengenali dan

memverifikasi status ekonomi rumah tangga secara tepat membuka peluang bagi kelompok yang tidak berhak untuk mengakses subsidi. Masalah ini semakin rumit dengan tidak tersedianya basis data kemiskinan yang terintegrasi dan diperbarui secara rutin, sehingga pangkalan gas dan toko sembako kesulitan menentukan penerima yang tepat. Situasi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan data kependudukan dan kemiskinan, padahal data tersebut seharusnya menjadi dasar utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Faktor psikologis dan sosiologis turut berperan signifikan dalam terjadinya penyimpangan ini. Pandangan sosial terhadap kemiskinan menyebabkan sebagian keluarga yang benar-benar membutuhkan enggan memanfaatkan subsidi, sementara itu kelompok masyarakat menengah ke atas justru merasa berhak menikmati fasilitas publik tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan distribusi (Priyanto & Arif, 2025). Selain itu, pola hubungan sosial yang menempatkan tokoh masyarakat atau pemangku kekuasaan sebagai figur yang tidak mudah dikritik turut melemahkan fungsi kontrol sosial, karena warga cenderung enggan menyampaikan keberatan atau melaporkan pelanggaran di lingkungan sekitar. Kondisi ini membentuk pola berulang di mana penyimpangan dianggap hal biasa dan dapat diterima. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan menggabungkan pembenahan sistem administratif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.

Penyimpangan Dalam Kategori Usaha Mikro

Selain permasalahan dalam kategori rumah tangga, penyaluran gas subsidi kepada usaha mikro juga mengalami ketidakseimbangan yang signifikan. Meski tidak dalam jumlah yang besar, namun beberapa usaha skala besar seperti restoran dan usaha las masih menggunakan gas LPG 3kg bersubsidi. Bapak Slamet, pemilik warung bakso di Desa Pulung Kencana, menjelaskan: *"Gas 3kg ini seharusnya untuk usaha kecil seperti saya, tapi saya lihat restoran besar juga pakai gas ini. Mereka beli dalam jumlah banyak, sedangkan usaha kecil seperti saya malah susah dapat"*. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan klasifikasi usaha dalam pendistribusian gas bersubsidi. Penelitian oleh (Prayitno dkk., 2023) mengonfirmasi bahwa tidak jelasnya kriteria penggunaan tabung elpiji 3kg bersubsidi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan subsidi.

Faktor Penyebab Tidaktepatnya Sasaran

Lemahnya Sistem Verifikasi dan Identifikasi Penerima

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miskun selaku pemilik pangkalan, terungkap bahwa: *"Kami tidak punya data masyarakat kurang mampu di desa ini. Jadi ya siapa yang datang beli, kami layani, kecuali yang berstatus sebagai ASN."* Ketidadaan sistem verifikasi berbasis identitas ini menyebabkan pangkalan tidak dapat membedakan konsumen yang berhak dengan yang tidak berhak menerima subsidi. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Sukri, 2025) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam penentuan penegakan hukum dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum, yang meliputi faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

Kelemahan dalam sistem verifikasi dan identifikasi penerima menunjukkan belum matangnya infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah (Syazali dkk., 2024). Ketergantungan pada metode manual oleh petugas pangkalan dalam menentukan kelayakan penerima membuka peluang terjadinya penyimpangan secara sistematis. Situasi ini semakin buruk karena tidak adanya pelatihan yang memadai bagi petugas pangkalan terkait kriteria dan prosedur verifikasi, sehingga mereka cenderung menggunakan cara yang praktis dan instan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan maupun ketepatan sasaran. Lemahnya sistem verifikasi ini juga menggambarkan

bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tantangan pelaksanaan kebijakan yang membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan terstandar.

Aspek kelembagaan turut memberikan kontribusi besar terhadap lemahnya sistem verifikasi, di mana pembagian kewenangan yang tidak terkoordinasi antar instansi menciptakan celah koordinasi yang rawan disalahgunakan. Tidak adanya protokol standar dalam proses verifikasi identitas dan status sosial ekonomi penerima menyebabkan setiap pangkalan menerapkan metode yang berbeda-beda, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak adil di tengah masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dikembangkan sistem verifikasi elektronik yang terintegrasi dengan data kependudukan dan kemiskinan, disertai dengan penyusunan protokol standar yang dapat diterapkan secara merata di seluruh pangkalan distribusi. Di samping itu, pelatihan berkelanjutan bagi petugas pangkalan dan penerapan sistem pemantauan yang efektif juga diperlukan untuk menjamin implementasi kebijakan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiadaan Mekanisme Pengawasan Yang Efektif

Hasil wawancara dengan Bapak Hendarwan, Kepala Desa Pulung Kencana, mengungkapkan: *"Memang kami tahu ada masalah dengan distribusi gas 3kg ini, tapi kami tidak punya wewenang langsung untuk mengawasi. Yang berwenang itu dinas terkait di kabupaten."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan dalam koordinasi antar lembaga dan mekanisme pengawasan di tingkat desa. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pengawasan, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian (Hendra & Mayarni, 2024) bahwa faktor utama penghambat dalam pengawasan adalah kurangnya SDM di instansi terkait.

Aspek sosiologis juga memainkan peran penting dalam ketidakpatuhan terhadap regulasi, dimana kultur permisif dan toleransi terhadap pelanggaran kecil menciptakan normalisasi terhadap penyimpangan. Masyarakat cenderung memandang penggunaan subsidi oleh kelompok yang tidak berhak sebagai hal yang wajar dan tidak merugikan siapapun. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi terjadinya penyimpangan secara masif dan sistematis. Dari perspektif hukum Islam, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab sosial (Priyanto dkk., 2024). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan pembentukan sistem insentif yang mendorong kepatuhan. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam mengawasi implementasi regulasi, sehingga terciptanya kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi

Meskipun Surat Edaran Gubernur Lampung telah secara eksplisit melarang ASN menggunakan gas LPG 3kg bersubsidi, implementasi di lapangan menunjukkan ketidakpatuhan yang masif. Hal ini mengindikasikan lemahnya sanksi dan *enforcement* terhadap pelanggaran regulasi yang ada (Tarigan dkk., 2025). Bapak Dedi, seorang PNS di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, ketika dikonfirmasi mengenai penggunaan gas bersubsidi, menyatakan: *"Saya tidak tahu ada larangan khusus untuk PNS. Lagipula gas 3kg kan dijual bebas di pangkalan."* Pernyataan ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi yang berlaku, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada mencerminkan lemahnya sistem penegakan hukum dan kultur kepatuhan dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, namun juga di kalangan aparatur sipil negara yang seharusnya

menjadi teladan dalam mematuhi regulasi yang berlaku. Ketidakpatuhan ini dapat dikaitkan dengan lemahnya sosialisasi regulasi, dimana masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program subsidi (Kolang, 2025). Selain itu, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran regulasi menciptakan persepsi bahwa pelanggaran dapat ditoleransi dan tidak akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem deterrence dalam penegakan hukum di Indonesia.

Aspek sosiologis juga memainkan peran penting dalam ketidakpatuhan terhadap regulasi, dimana kultur permisif dan toleransi terhadap pelanggaran kecil menciptakan normalisasi terhadap penyimpangan. Masyarakat cenderung memandang penggunaan subsidi oleh kelompok yang tidak berhak sebagai hal yang wajar dan tidak merugikan siapapun. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi terjadinya penyimpangan secara masif dan sistematis. Dari perspektif hukum Islam, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan pembentukan sistem insentif yang mendorong kepatuhan. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam mengawasi implementasi regulasi, sehingga terciptanya kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Analisis Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Distribusi Subsidi

Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, distribusi subsidi gas elpigi 3kg yang tidak tepat sasaran bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.* (Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 135)

Dari ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya kita harus berlaku adil. Kondisi ini sejalan dengan penjelasan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih besar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan (Razali dkk., 2022). Kondisi dimana masyarakat menengah ke atas dan PNS menggunakan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang nyata. Hal ini tidak sejalan dengan konsep keadilan dalam *fiqh siyasah* yang didasarkan demi kepentingan negara dan kemaslahatan umat.

Penerapan prinsip keadilan dalam penyaluran subsidi gas elpiji memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai konsep keadilan distributif dalam pandangan Islam, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek prosedur, tetapi juga pada nilai-nilai substansi. Dalam Islam, keadilan distributif mengharuskan distribusi sumber daya publik dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas individu secara adil, sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan mendapatkan prioritas dalam menerima bantuan pemerintah. Ketika kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu justru menikmati subsidi yang ditujukan bagi golongan kurang mampu, hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan atau kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Situasi seperti ini bukan

hanya merugikan secara ekonomi bagi penerima yang seharusnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial serta konflik dalam masyarakat.

Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Kebijakan Publik

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki amanah untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa, berdasarkan asas otonomi, pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan yang dapat menjadi acuan keberhasilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Mayyadah dkk., 2025). Ketidakmampuan dalam memastikan tepat sasaran distribusi subsidi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah ini. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Fazhira & Irwansyah, 2023) yang menekankan bahwa *siyasah tanfidziyah* memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengajarkan kejujuran dan keadilan serta penghargaan terhadap keputusan yang telah disepakati bersama.

Konsep amanah dalam pengelolaan kebijakan publik menempatkan pemerintah sebagai amanah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Dalam konteks distribusi gas bersubsidi, amanah yang diemban pemerintah adalah memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan amanat regulasi yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan dalam melaksanakan amanah ini mencerminkan lemahnya integritas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari perspektif etika pemerintahan Islam, kegagalan dalam melaksanakan amanah bukan hanya merupakan kegagalan teknis, namun juga kegagalan moral yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban di hadapan Allah dan masyarakat.

Konsep Masalah dalam Implementasi Kebijakan

Prinsip masalah dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* menekankan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks distribusi gas bersubsidi, kemaslahatan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat kurang mampu dengan harga terjangkau. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mencapai tujuan maslahatnya secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh (Putri dkk., 2025) tinjauan *siyasah tanfidziyah* menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* yang berlaku ketika implementasinya tidak mencapai sasaran yang tepat.

Konsep masalah dalam implementasi kebijakan publik mengharuskan setiap tindakan pemerintah berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang maksimal bagi masyarakat, dengan meminimalkan kemudaran yang dapat timbul dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks distribusi gas bersubsidi, masalah yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat kurang mampu dengan harga terjangkau, sehingga mereka dapat mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas. Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi tidak hanya mengurangi masalah yang dapat dicapai, namun juga menciptakan mafsadah (kerusakan) berupa ketidakadilan sosial dan pemborosan sumber daya publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh membahayakan) dalam Islam.

Implikasi Tidaktepatnya Sasaran Terhadap Kemaslahatan Umat

Dampak Sosial-Ekonomi

Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi gas bersubsidi menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima utama subsidi justru mengalami kesulitan akses, sementara kelompok yang tidak berhak menikmati manfaat subsidi secara tidak proporsional. Ibu Lis, seorang ibu rumah tangga

miskin di Desa Pulung Kencana, mengungkapkan: *"Kami yang benar-benar butuh malah susah dapat gas murah. Uang belanja jadi berkurang karena harus beli gas yang mahal, harga gas bisa mencapai 27 ribu jika ada hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, hari raya natal dan hari raya idul adha."* Keadaan ini menunjukkan adanya pola subsidi yang tidak proporsional, yaitu ketika bantuan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi, sedangkan kelompok yang seharusnya menjadi prioritas justru menerima manfaat yang lebih sedikit.

Dampak sosial ekonomi dari ketidaktepatan sasaran distribusi subsidi gas elpigi menciptakan rangkaian konsekuensi yang kompleks dan saling terkait dalam struktur masyarakat. Secara ekonomi, masyarakat kurang mampu yang kehilangan akses terhadap subsidi terpaksa mengalokasikan sebagian pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energi, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk mengakses kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Kondisi ini dapat menciptakan perangkap kemiskinan yang semakin sulit untuk diatasi, dimana keluarga kurang mampu terjebak dalam siklus kemiskinan yang diperparah oleh ketidakadilan dalam akses terhadap bantuan pemerintah. Dari perspektif pembangunan manusia, ketidaktepatan sasaran subsidi dapat menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar.

Ketidakseimbangan Alokasi Sumber Daya

Dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan sumber daya publik harus dialokasikan secara efisien dan berkeadilan. Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan alokasi sumber daya yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian (Hapsar dkk., 2025), implementasi regulasi harus konsisten dengan prinsip-prinsip pelayanan dalam Islam sebagaimana diuraikan dalam siyasah tanfidziyah, yang meliputi prinsip legalitas, transparansi, non-diskriminasi, serta efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi aktual dan tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah*, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam sistem distribusi gas elpigi 3kg bersubsidi. Perbaikan ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan mekanisme administratif yang efektif untuk memastikan tercapainya kemaslahatan umat secara optimal. Pertama, perlu dibentuk sistem verifikasi berbasis data yang akurat dan terintegrasi untuk memastikan hanya penerima yang berhak yang dapat mengakses subsidi. Kedua, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan multi-level yang melibatkan berbagai pihak. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif mengenai regulasi yang berlaku, khususnya kepada ASN dan masyarakat umum. Keempat, diperlukan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran distribusi subsidi untuk menciptakan efek jera yang efektif.

Kompleksitas permasalahan distribusi gas elpigi 3kg di Desa Pulung Kencana memerlukan pendekatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi. Mengacu pada penelitian (Adiman dkk., 2023), implementasi sistem informasi manajemen distribusi gas elpigi berbasis web dapat memberikan solusi signifikan dalam mengatasi ketidakakuratan data dan proses distribusi yang tidak terstruktur. Sistem terkomputerisasi terbukti lebih unggul dibandingkan sistem manual dalam mencapai efektivitas dan efisiensi operasional. Pengembangan sistem informasi distribusi harus mengintegrasikan komponen data penerima manfaat, verifikasi identitas berbasis elektronik, dan mekanisme pelaporan real-time yang dapat diakses oleh berbagai pihak terkait. Penelitian (Dewi dkk., 2023) menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan gas elpigi yang terkomputerisasi mampu mengatasi permasalahan pencatatan stok manual dan memberikan formulir input yang terstandar untuk transaksi dan pelaporan penjualan. Implementasi sistem serupa dalam konteks distribusi subsidi dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan

meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan (Husny dkk., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan secara komprehensif bahwasanya dapat ditarik kesimpulan, distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi belum terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subsidi ini seharusnya ditujukan bagi keluarga kurang mampu dan pelaku usaha kecil, namun dalam praktiknya justru banyak dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas, termasuk pegawai negeri. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa saja yang benar-benar berhak menerima, lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan dalam melanggar aturan. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru kesulitan memperoleh gas bersubsidi karena sudah diborong oleh pihak yang tidak berhak. Situasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran dalam menjalankan amanah, serta keberpihakan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

REFERENSI

- Adiman, M. F., Roziqin, M. K., & Rahman, M. (2023). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Distribusi Gas Elpiji Berbasis Web Pada PT. Bumi Gasindo Raya. *JUSTIFY: Jurnal Sistem Informasi Ibrahimy*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.35316/justify.v1i2.2593>
- Azim, M. F., Budiman, A., & Arsyad, M. (2025). *Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*.
- Dewi, A. F., Ghozali, R. M., & Budiono, K. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Gas LPG 3 KG Di PT. Nafa Energi Indonesia Botolinggo, Bondowoso. *JMBI: Jurnal Manajemen Bisnis Dan Informatika*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31967/prodimanajemen.v4i1.908>
- Djohanis, H. (2024). *Implementasi Kebijakan Penjualan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai)*. 1(4).
- Fazhira, S., & Irwansyah, I. (2023). Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 558. <https://doi.org/10.29210/1202323080>
- Hapsar, R. T. B., Nurnazli, N., & Pradikta, H. Y. (2025). Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Studi di Polres Metro. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3554–3564. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4596>
- Hendra, M., & Mayarni, M. (2024). Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 210–220. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.202>
- Husny, H., Kurniawan, F., & Lasmadi, L. (2022). Pengembangan Sistem Pemantau Kebocoran Gas Elpiji dan Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Berbasis Internet Of Things. *Aviation Electronics, Information Technology, Telecommunications, Electricals, Controls*, 4(1), 61–74. <https://doi.org/10.28989/avitec.v4i1.1181>

- Kolang, A. R. C. G. (2025). Normative Reposition of Regional Head Regulations in the Indonesian Legal System. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 39–54. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26341>
- Lail, M. N., Dhia, D., & Mansis, I. R. (2023). *Pengeluaran Negara untuk Perlindungan Sosial Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Telaah APBN 2023*.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>
- Muhammad Iqbal. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Muharam, R. S., Rusli, B., Karlina, N., & Candradewini, C. (2025). Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kg Di Jawa Barat: Distribusi Kesejahteraan, Risiko Ekologis, Dan Ekonomi Publik. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 7(1), 130–141. <https://doi.org/10.36985/p2w01m95>
- PERPRES No. 104 Tahun 2007. (2007). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/42150/perpres-no-104-tahun-2007>
- Prayitno, E. P., Masjaya, M., & Noor, M. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur. *TheJournalish: Social and Government*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i1.376>
- Priyanto, A., Alamsyah, M. S., & Arif, M. Y. A. (2024). The Effectiveness of Implementing a Closed-list Proportional System in Selecting Legislative Members from the Perspective of Islamic Law. *KnE Social Sciences*, 433–444. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15001>
- Priyanto, A., & Arif, M. Y. A. (2025). Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>
- Putri, K. R., Saebani, B. A., & Prasetyo, R. E. (2025). Implementasi Rationalisiering Der Herrschaft terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik di Pemerintahan Kota Bandung dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), Article 4. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1561>
- Razali, M. F., Umur, A., & Putri, S. K. (2022). Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(2), 266. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.15218>
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Sukri, I. (2025). Law Enforcement Against Air Pollution Siyasah Tanfidziyah Perspective (Case Study In Parepare City): Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kota Parepare). *Constitutional Law Society*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.95>
- Syazali, E. A., Najwan, J., & Muskibah, M. (2024). Legal Reform and Strengthening of The Financial Services Authority (OJK): Protecting Investors From Insider Trading in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 184–209. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.25513>
- Tarigan, M. I., Hafandi, R., & Hakim, D. A. (2025). Manifesting the Spirit of “Gotong-Royong” between State Institutions in Maritime Security: As an Effort to Regulate and Enforce Law in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.25938>